

BAB II

KONDISI PENDIDIKAN DI INDIA

Pada bab ini akan membahas kondisi secara umum pendidikan di India terkait dengan sistem pendidikan, kualitas pendidikan, hambatan pendidikan, NEP 2020, bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah India dan kontribusi Upaya yang diberikan oleh UNICEF di India.

2.1 Gambaran Umum Pendidikan di India

India merupakan negara dengan universitas yang sudah mendunia. Kemajuan yang signifikan menunjukkan bahwa pendidikan di India telah mencapai kualifikasi pendidikan yang universal. Namun, hasil pembelajaran masih terlihat rendah. Pembentukan NEP (National Education Policy) 2020 sebagai gebrakan baru dari pemerintah India dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan menangani masalah tersebut. Penolakan dari negara bagian masih menjadi masalah dalam implementasi kebijakan NEP karena masih perlu dilakukannya perbaikan terhadap kesenjangan kapasitas analitis, operasional, dan politik yang baik dalam mewujudkan visi sepenuhnya terhadap keinginan menjadi negara adikuasa pengetahuan global.²³

Kemajuan yang signifikan dalam dunia pendidikan di India tidak terlepas dari kebijakan NEP (National Education Policy) yang dibentuk pada tahun 2020 sebagai penyempurnaan dari kebijakan sebelumnya yang berupaya memberikan

²³ Yifei Yan, "India's National Education Policy Attempts to Address Poor Learning Outcomes," *East Asia Forum*, last modified 2024, <https://eastasiaforum.org/2024/05/30/indias-national-education-policy-attempts-to-address-poor-learning-outcomes/>.

kesempatan dalam belajar dan meraih prestasi tanpa melihat latar belakang sosial ekonomi mereka. Dengan adanya kebijakan yang mencakupi 28 wilayah negara bagian dengan 8 baru berjalan empat tahun ini, diharapkan tidak ada lagi anak-anak yang merasakan kesenjangan gender dalam hal akses, partisipasi, dan hasil pembelajaran.²⁴ India adalah negara yang memiliki sistem pendidikan tinggi yang berkualitas. Pernyataan tersebut menjadi pembuktian terhadap peningkatan kesempatan belajar dan akses pendidikan yang diberikan pemerintah India kepada semua kalangan anak muda untuk menuntut ilmu.²⁵ Keberhasilan atas kemajuan pendidikan yang semakin signifikan tidak terlepas dari peran dan upaya yang dilakukan pemerintah India, seperti pendanaan atau anggaran untuk pendidikan yang dibagi dalam dua kategori, yakni sekolah dasar dan pendidikan tinggi atau jenjang universitas.

Per Tahun 2023—2024, anggaran pendidikan India mencapai INR 1,13 triliun setara dengan 214,7 Triliun IDR sebagai akumulasi akhir sebelum pemilihan umum selanjutnya yakni pada tahun 2024. Dengan begitu, signifikansi pendidikan meningkat sebanyak 13% dari tahun sebelumnya.²⁶ Sebagai reformasi kebijakan baru dalam dunia pendidikan di India, NEP 2020 adalah bentuk langkah yang penting sebab hal ini dapat berfokus pada perubahan kurikulum yang bertujuan

²⁴ PIB Delhi, “Quality Education,” *Department of School Education And Literacy*.

²⁵ Jason Anderson and Amy Lightfoot, *The School Education System in India*, 2019, https://www.britishcouncil.in/sites/default/files/school_education_system_in_india_report_2019_final_web.pdf.

²⁶ Sandeepa Sahay, “India’s National Education Budget for 2023-24,” *Insight.Britishcouncil.Org/*, last modified 2023, <https://opportunities-insight.britishcouncil.org/blog/india’s-national-education-budget-2023-24>.

membangun keterampilan dan dasar pada pengembangan holistik para siswa.²⁷ Namun, lagi-lagi terdapat pernyataan yang sangat berbanding terbalik dari kemajuan pendidikan di India, yakni adanya pembatasan hak bagi perempuan dalam bekerja. Kemajuan pendidikan di India tidak terlepas dari pengaruh perempuan dalam mencapai pendidikan yang tinggi.

Di samping itu, kemajuan pendidikan di India juga didorong untuk mendapatkan kesempatan dalam memperoleh tempat bukan untuk kembali dalam perkawinan. Hal tersebut bertujuan untuk melahirkan generasi yang terdidik. Walaupun demikian, kemajuan dari pendidikan di kalangan perempuan belum banyak mengetahui siapa yang harus mencari nafkah dalam keluarga. Bagaimana tidak, peneliti Oxford menemukan jika orang tua di India pada dasarnya menginvestasikan anaknya dalam pendidikan yang tinggi semata-mata untuk keuntungan pernikahan.²⁸ Karena hal ini, India menempati posisi ke-148 dari 193 negara dalam keterlibatan perempuan di parlemen. Dengan begitu, India telah menunjukkan kesempatan perempuan dalam bekerja yang juga terbatas, terlepas dari pengaruh kesetaraan gender. Sebuah studi dari A United Nations University menunjukkan pengaruh dari keterlibatan perempuan dalam kinerja legislasi perempuan agar mampu meningkatkan kinerja ekonomi tahunan.²⁹ Oleh sebab itu,

²⁷ Iqbaljeet Singh Bains, "India to Become a Globally Prominent Education Hub," *Invest India*, last modified 2024, <https://www.investindia.gov.in/sector/education>.

²⁸ Karishma Mehrotra, "India's Women Are Staying in School Longer — but Not for Their Careers," *The Washington Post*, last modified 2023, <https://www.washingtonpost.com/world/2023/12/09/india-women-education-workforce-marriage/>.

²⁹ Niharika Rustagi, "India's Female Representation Bill Is Still Seated," *East Asia Forum*, last modified 2022, <https://eastasiaforum.org/2022/04/20/indias-female-representation-bill-is-still-seated/>.

kesetaraan bagi perempuan harus rata dalam segala aspek seperti pendidikan, pekerjaan, dan lingkup parlementer sekali pun.

Penunjang pendidikan yang baik adalah pemenuhan infrastruktur yang terpenuhi dengan efektif. Bangunan sekolah di segala jenjang pendidikan, merupakan elemen penting dalam memulai pendidikan. Jumlah sekolah yang tersedia di India secara keseluruhan dari semua jenjang³⁰ untuk tingkat Primary 743.474 bangunan sekolah, untuk jenjang Upper Primary 426.894 bangunan sekolah, untuk tingkat Secondary 145.452 bangunan, dan tingkat Higher Secondary 150.289 yang jika dijumlahkan sekitar 1.466.109 bangunan secara keseluruhan berdasarkan data dari UDISE+.

2.1.1 Sistem Pendidikan di India

India menggunakan sistem pendidikan 10+2+3, yang terdiri dari 10 tahun sekolah dasar dan menengah, 2 tahun sekolah menengah atas, dan 3 tahun kuliah untuk jenjang sarjana. Sistem ini merupakan warisan dari masa penjajahan Inggris, yang masih mempengaruhi pendidikan di India dan telah merubah sistem pendidikan menjadi 5+3+3+4. Sebagai bagian dari pembaruan terbaru, pemerintah India meluncurkan kebijakan pendidikan nasional atau NEP 2020. Kebijakan ini menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, fleksibel, dan berfokus pada

³⁰ MoE Government of India, *REPORT ON UNIFIED DISTRICT INFORMATION SYSTEM FOR EDUCATION PLUS (UDISE+)*, *Dsel.Education.Gov.In*, 2023, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

keterampilan. NEP 2020 menjadi langkah besar untuk memodernisasi pendidikan di India agar lebih siap menghadapi tantangan global dan kebutuhan abad ke-21.³¹

Kemajuan pendidikan di India menunjukkan bahwa berbagai perubahan yang dilakukan pemerintah benar-benar memberikan dampak besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka melek huruf dan semakin banyaknya masyarakat yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Menurut data sensus India tahun 2021, angka melek huruf naik cukup signifikan. Sementara itu, pada tahun 2020, jumlah mahasiswa yang masuk perguruan tinggi mencapai 27,3%.³² India juga dikenal memiliki beberapa perguruan tinggi bergengsi seperti IIT (Indian Institutes of Technology) dan IIM (Indian Institutes of Management). Lembaga-lembaga ini secara konsisten masuk dalam daftar kampus terbaik dunia. Kehadiran mereka menjadi bukti bahwa pendidikan tinggi di India terus mengalami kemajuan. Sistem pendidikan di India dikelola oleh lembaga pemerintah, terutama oleh NCERT (National Council of Educational Research and Training) yang bertanggung jawab atas pengembangan kurikulum dan pelatihan guru. Selain itu, Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia juga berperan dalam merancang kebijakan pendidikan secara umum.

Meskipun adanya perubahan kebijakan dari pemerintah India terkait dengan pendidikan, hal ini tidak mengubah sistem pendidikan yang telah berlaku. Meskipun demikian peningkatan literasi di India meningkat secara signifikan,

³¹ Gov Of India, *ALL India Survey on Higher Education, Ministry of Education*, n.d.

³² "Population Enumeration Data (Final Population)," *Census of India*, <https://censusindia.gov.in/census.website/>.

namun belum merata secara keseluruhan di negara bagian dan pedesaan di India. Tingkat literasi secara keseluruhan di India pada tahun 2022-2023 berdasarkan data dari statista yaitu pertahun yaitu pertahun 2022 sebanyak 76.32% dengan persentase wanita 69.1% dan laki-laki 83.45%. sedangkan pada tahun 2023 secara keseluruhan tersajikan sebanyak 77% dengan persentase wanita 70% dan laki-laki 85%. Perbandingan yang jauh antara laki-laki dan perempuan berdasarkan tingkat literasi. Hal ini memang di faktori karena pemerataan fasilitas sekolah di pedesaan atau negara bagian di India yang masih belum merata secara keseluruhan dan juga karena kemiskinan menjadi faktor lainnya.³³

Hal ini menuntut pemerintah India dalam membentuk kebijakan pendidikan di India yang dilatarbelakangi oleh pemenuhan terhadap kesempatan dalam bersekolah, sedangkan sistem pendidikan di India sendiri tidak ada perubahan, yakni masih menggunakan sistem prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, pascasarjana, tersier, serta program gelar umum. Masing-masing dari jenjang pendidikan di India tersebut memiliki rentan waktu dalam mengenyam pendidikan yang berbeda. Jenjang prasekolah ditempuh selama 2—3 tahun dengan minimal usia 3—5 tahun; sekolah menengah pertama ditempuh selama 2—3 tahun dengan minimal usia 13—15 tahun; dan sekolah menengah atas ditempuh selama 2 tahun masa sekolah dengan minimal usia 16—17 tahun,

³³ “India: Literacy Rate from 1981 to 2022, by Gender,” *World Bank*, last modified 2023, <https://www.statista.com/statistics/271335/literacy-rate-in-india/>.

sedangkan pascasarjana dan tersier batas usia pun tahun ajarannya beragam menyesuaikan dengan program gelar yang ditempuh.³⁴

Selain sekolah formal pada umumnya, India juga menyediakan sekolah kejuruan untuk para siswa yang ingin melanjutkan pendidikan dalam jenjang sekolah kejuruan. Berpegang teguh pada konsep Bapak Pendidikan India, yakni Mahatma Gandhi tentang pengimplementasiannya dari hasil pembentukan. Mahatma Gandhi meyakini bahwa, “Manusia yang berkepribadian utuh dan kreatif akan selalu produktif”. Konsep tersebut dimaknai sebagai bentuk gebrakan dalam melanjutkan pendidikan ke tingkat tinggi yang mencakup teknik kedokteran, hukum, sains, manajemen, seni, dan humaniora. Selain itu, penyediaan pendidikan tinggi tersebut memberikan pengaruh juga terhadap sebagian siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang sekolah kejuruan.³⁵ Jika dijabarkan dalam bentuk tabel, dapat dipahami sebagai berikut.

Tabel 1.4

Sistem Pendidikan di India

Masa Pendidikan	Usia (Tahun)	Jenjang Pendidikan (Kelas)
Higher Secondary	17—18	12
	16—17	11

³⁴ “The Education System in India,” *Nces.Ed.Gov*, last modified 2015, https://nces.ed.gov/pubs2016/2016100/app_a8.asp.

³⁵ Ali Sobri and Komarudin Sassi, “Potret Sistem Pendidikan India Era Kontemporer: Tetap Solid Pada Kebijakan Ghandi,” *ALFIHRIS : Jurnal Inspirasi Pendidikan* 2, no. 1 (2023): 220–233.

Secondary	15—16	10
	14—15	9
Upper Primary	13—14	8
	12—13	7
	11—12	6
Primary	10—11	5
	9—10	4
	8—9	3
	7—8	2
	6—7	1
Pre-Primary	5—6	
	4—5	
	3—4	

Sumber : Nces.Ed.Gov

Berdasarkan Tabel 1.4 diatas menjelaskan struktur sistem pendidikan di India yang dibagi menjadi lima tahap utama berdasarkan usia dan tingkat kelas. Pendidikan dimulai dari jenjang Pre-Primary atau sekolah anak usia dini untuk anak-anak usia 4–5 tahun. Setelah itu, mereka masuk ke jenjang Primary untuk usia 6–11 tahun, yang mencakup kelas 1 sampai kelas 5. Tahap selanjutnya adalah Upper Primary untuk anak usia 11–14 tahun (kelas 6 hingga 8), kemudian Secondary untuk usia 14–16 tahun (kelas 9 dan 10), dan terakhir Higher Secondary untuk siswa usia 16–18 tahun (kelas 11 dan 12). Struktur ini mencerminkan

pendekatan yang bertahap dan terencana dalam pendidikan, mulai dari usia dini hingga persiapan ke jenjang perguruan tinggi. Sistem ini dikenal dengan pola 10+2+3, yaitu 10 tahun pendidikan dasar dan menengah, 2 tahun pendidikan menengah atas, dan 3 tahun pendidikan tinggi (jenjang sarjana). Pola ini merupakan warisan dari sistem pendidikan Inggris yang masih digunakan hingga sekarang di India.

2.1.2 Kebijakan Sistem Pendidikan di India sebelum NEP 2020 (National Education Policy)

Pemerintah India telah banyak melakukan pembaharuan kebijakan pendidikan yang di berlakukan. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam menciptakan pendidikan yang setara dengan segala pertimbangan. Sebelum kebijakan yang saat ini berlaku, keputusan pembentukan kebijakan pendidikan berlaku pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan dengan keberagaman persyaratan dan ketentuan tertentu yang di berlakukan. Terlepas dari masa penjajahan Inggris dan setelah kemerdekaan mereka penjajahan.

2.1.2.1 Kebijakan sistem pendidikan sebelum kemerdekaan

a. Periode Upanishad

pada masa periode ini pemberlakukan keistimewaan bagi seorang guru, hal ini karena posisi mereka yang di hormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Namun hal ini di lakukan tidak hanya karena ilmu pengetahuan yang baik ataupun memiliki wawasan yang luas, juga mereka adalah golongan orang yang memiliki kemampuan tangan, hati dan pikiran yang

baik. Pada periode ini guru memberikan perhatian yang intens kepada para siswa, karena adanya hubungan yang erat. Ketentuan yang berlaku pada periode ini ada pada guru, dalam menerima siswa dengan harapan yang besar dalam membentuk moral mereka. Pengajaran yang dilakukan secara lisan ke lisan, oleh karena itu penjelasan yang jelas dan baik adalah sarana bagi siswa memahami pengetahuan melalui guru. Terdapat lima langkah yang dipraktikkan dalam memahami agama dan pengetahuan pada zaman India kuno: 1. Mendengarkan secara seksama terkait dengan kata-kata yang diucapkan seorang guru, 2. Memahami makna yang tersirat dari kalimat yang diucapkan, 3. Penalaran yang lebih mengarah kepada generalisasi, 4. Melakukan konfirmasi atau keabsahan makna kepada teman atau guru, 5. Pengaplikasian apa yang telah di dapat.

b. Periode Buddhis

Terdapat ciri khas pada masa periode ini bahwa setiap samanera yang telah diterima, mereka harus menempatkan diri dalam bimbingan dan pengawasan dibawah naungan seorang Upajjhaya (Guru). Pada periode ini peran dari upajjhaya memiliki tanggung jawab yang besar dan peran yang penting dalam membentuk diri seorang Saddhiviharika atau sebagai pemula (Siswa). Dalam proses pengajaran pada periode ini menggunakan metode lain seperti pembacaan lisan, melakukan debat pengetahuan, dan melakukan diskusi, eksposisi, tanya jawab terkait pemahaman yang mereka dapatkan, menyampaikan pandangan dengan perumpamaan dan cerita.

c. Periode Abad Pertengahan

Pada masa perkembangan periode abad pertengahan ini, tradisi islam mulai masuk dengan membawakan pengaruh terhadap perkembangan pengetahuan dalam bidang filsafat, teologi, agama, seni rupa, seni melukis, matematika, dan keberagaman pengetahuan baru lainnya. Kemajuan pendidikan tidak dilakukan secara langsung, namun melakukan penyebaran kepada mereka yang sangat membutuhkan seperti anak-anak perempuan dan laki-laki. Perkembangan pada periode ini lebih pesat, karena pembangunan sekolah dan perguruan tinggi yang maju, penyediaan fasilitas seperti perpustakaan tersedia bagi siswa yang membutuhkan bacaan.

d. Periode Modern

Perkembangan pendidikan pada periode ini mengalami peningkatan karena ada pengaruh dari kolonialisme penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Pendidikan mulai maju dengan pesat, disediakannya layanan pelatihan guru di India. Pada periode ini penggunaan bahasa Inggris sangat besar pengaruhnya dalam dunia pembelajaran.³⁶

2.1.2.2 Kebijakan Sistem pendidikan setelah kemerdekaan

a. Komisi pendidikan universitas tahun 1948

³⁶ Dinesh Chand, "Education System in Pre-Independence India" 1, no. 2 (2015): 110–113.

Setelah kemerdekaan India dari bangsa Eropa komisi pertama kali dibentuk adalah komisi pendidikan universitas. Komisi universitas ini dibentuk untuk malakukan penyempurnaan laporan-laporang tentang universitas di India. Selain itu pemerintah India juga melakukan amandemen terhadap laporan yang tersebut. Hal ini dilakukan tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat India pada saat itu dan masa yang akan mendatang dengan aspirasi negara tentunya.

b. Komisi Pendidikan Menengah komisi 1952-1953

Komisi ini dibentuk dibawah pimpinan Laxmanswami Mudaliar. Selama komisi ini berjalan banyaknya tantangan yang dihadapi seperti metode pembelajaran yang tertinggal lama, minimnya pengetahuan terbaru, perkembangan pendidikan yang tidak sesuai dengan minat anak, masih menggunakan bahasa penjajahan yaitu bahasa inggris. pada masa komisi pendidikan mnengah ini, besar harapan terhadap pembentukan kebijakan baru dalam dunia pendidikan seperti jangka waktu sekolah anak lebih bervariasi berdasarkan umur dan jenjangn sekolah mereka, kurikulum pendidikan yang lebih terbaru sehingga mampu memberikan pengembangan terhadap pendidikan siswa.

c. Komisi Kothari 1964-1966

Komisi Kothari ini dibentuk berdasarkan ketidakmampuan komisi pendidikan sebelumnya dalam menyesuaikan perkembangan pengetahuan dan perkembangan zaman di India pada saat itu. Dapat dikatakan jika

komisi Kothari adalah penyempurnaan kebijakan sebelumnya dalam mengatasi segala bentuk kekurangan yang dihadapi dalam bidang pendidikan. Dalam kebijakan ini banyak memberikan rekomendasi yang terbaru seperti, pendidikan yang memiliki tujuan nasional, pelatihan yang diberikan kepada pengajar atau guru, dukungan pendidikan dengan memberikan konsep pengalaman kerja, dan peluang kesempatan yang sama dalam pendidikan.³⁷

Periode pasca-kemerdekaan ditandai dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh komisi-komisi komite pendidikan. Diantara ketiga komisi diatas, komis kothari menempati posisi yang krusial. Hal ini disebabkan karena komisi ini menempato posisi sebagai penasehat kepada Pemerintah India dalam membahas pola pendidikan nasional dan tentang kebijakan umum dalam pengembangan pendidikan di semua jenjang, muali dari jenjang dasar hingga pascasarjana. Komisi kothari merekomendasikan kepada Pemerintah India untuk membentuk kebijakan pendidikan nasional yang seharusnya memberikan panduan kepada pemerintah negara bagian di India dan pemerintah daerah dalam menyusun serta melaksanakan rencana dalam pendidikan di wilayah masing-masing.³⁸

d. Kebijakan Pendidikan Nasional 1968

³⁷ Odedara Pushpaben Sarman, "Post-Independence Indian Education Policy," *Online Journal of Multidisciplinary Subjects* 15, no. 2 (2021): 85–89.

³⁸ Bata Kishore Ray and Kishor Chandra Satpathy, *Evolution of National Policy on Education in India, Vistas of Education*, 2013.

Perkembangan dan kemajuan kebijakan pendidikan di India mulai mengalami perubahan yang signifikan sejak pemberlakuan kebijakan nasional. NPE 1968 dibentuk bertujuan untuk memenuhi prinsip dan arahan, hal ini juga didukung untuk mengatasi dan menghilangkan hambatan terhadap pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah India. Oleh karena itu, untuk terwujudnya tujuan tersebut pemerintah India melakukan pengembangan program dengan pemborosan dan stagnasi. Hal ini dilakukan untuk memfokuskan kepada anak-anak pedesaan dan perempuan yang belum mendapatkan pendidikan

Dalam kebijakan nasional 1968 pemerintah India merekomendasikan ketentuan meliputi, pendidikan gratis dan wajib, perkembangan bahasa yang menyeluruh, pendidikan menengah dan universitas ditingkatkan, pelatihan guru dan meningkatkan kompetensi profesional, pengembangan fasilitas anak perempuan dan pembentukan badan nasional.

Setelah menanungi kemajuan pendidikan pada tahun 1968, kebijakan nasional perlu dirumuskan kembali. Hal ini dilakukan sebagai tujuan pengimplentasian kebijakan yang terstruktur dan dapat di implementasikan terhadap duni pendidikan India diseluruh wilayah negara bagian.³⁹

³⁹ Sunita Adhav, "Impact of National Education Policy on the Education System in India," *International Journal of Novel Research and Development* 8, no. 12 (2023): 499–509, www.ijnrd.org.

e. Kebijakan Pendidikan Baru atau National Education Policy (NEP) 2020

Berbagai perubahan kebijakan sistem pendidikan di India, pemerintah India akhirnya menggantikan kebijakan sebelumnya yang telah berjalan selama 34 tahun. Kebijakan Pendidikan Nasional atau yang lebih dikenal dengan National Education Policy 2020. Kebijakan baru ini menjadi komprehensif kebijakan yang bertujuan untuk mereformasi dan merevitalisasi sistem pendidikan di India. NEP menekankan pentingnya kesetaraan dan pendidikan yang inklusif dalam artian kebijakan ini meningkatkan kualitas pendidikan di India sebagai kebaruan dari kebijakan sebelumnya.

Kebijakan baru ini di kenalkan oleh kementerian pendidikan India melalui survei yang dilakukan oleh NCERT di bawah naungan Kemneterian pendidikan India. Besar harapan dalam kebijakan ini sebagai pijakan awal pemerintah India dalam mewujudkan kebijakan agenda 2030 sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan dan bertujuan dalam mengubah India menjadi negara dengan masrakat yang berpengetahuan global. Tentu hal ini akan menjadikan pendidikan sekolah dan perguruan tinggi lebih holistik, fleksibel, dan inklusif dengan memberikan ruang bagi anak-anak dan perempuan yang belum mendapatkan akan hak mereka dalam pendidikan. Tentu hal ini akan menjunjung akan aspek kualitas pendidikan.⁴⁰

⁴⁰ C Shailusha M Kaveri, J srikant, "National Educational Policies in India," *SUMEDHA Journal of Management* 11, no. 2 (2022): 2925–2931.

2.2 Kualitas Pendidikan Anak di India

Pendidikan Anak dan perempuan di India menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Tentu hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan pemerintah India dalam meningkatkan pendidikan yang bertujuan agar semua tingkatan sosial masyarakat tanpa memandang gender mendapatkan haknya dari segi pendidikan yang meliputi wajib dan sekolah gratis. Pengupayaan yang dilakukan pemerintah India agar pemerataan pendidikan terpusatkan secara optimal. Menteri pendidikan India membuka peluang beasiswa kepada kelompok-kelompok yang terpinggirkan, kurang mampu, dan kurang terwakili untuk bertindak sebagai penyeimbang untuk mencapai mobilitas ekonomi dan sosial, inklusif dan kesetaraan. Namun pemerataan terhadap ketersediaan akses internet 50% dalam kegiatan belajar dan komputer masih berada di bawah 90-100 % ketersediaan berdasarkan hasil AUDISE+ tahun 2022-2023.⁴¹

Meskipun sistem pendidikan di India terus berkembang, masih ada beberapa masalah yang harus dihadapi. Salah satunya adalah belum meratanya kualitas pendidikan, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, masih ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam hal akses pendidikan. Masalah lain yang cukup serius adalah tingginya angka putus sekolah. Data menunjukkan bahwa angka putus sekolah di tingkat Primary sebesar 7,8%, di Upper Primary 8,1%, dan di tingkat Secondary bahkan mencapai 16,4%. Salah satu penyebabnya adalah kualitas guru yang belum merata. Di beberapa daerah, terutama yang terpencil, masih banyak

⁴¹ India, *REPORT ON UNIFIED DISTRICT INFORMATION SYSTEM FOR EDUCATION PLUS (UDISE+)*.

guru yang belum memiliki pelatihan yang cukup atau tidak memenuhi standar kualifikasi yang ditetapkan pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah India berusaha meningkatkan kemampuan para guru karena guru adalah kunci penting dalam keberhasilan belajar siswa. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan menjalankan program DIET (District Institutes of Education and Training).⁴² Program ini memberikan pelatihan bagi calon guru agar mereka siap mengajar di berbagai sekolah, baik di kota maupun di desa. Diharapkan, dengan adanya pelatihan ini, kualitas pengajaran di sekolah bisa menjadi lebih baik.

Selain itu, salah satu hal penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan pendidikan di India adalah penyediaan fasilitas yang ramah bagi semua siswa, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sayangnya, fasilitas seperti itu belum tersedia secara merata dan masih banyak terpusat di kota-kota besar. Di banyak sekolah yang berada di daerah pedesaan, akses terhadap fasilitas pendukung pembelajaran masih sangat terbatas. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 32,5% sekolah yang sudah menyediakan fasilitas yang ramah bagi siswa berkebutuhan khusus. Laporan UDISE+ tahun 2022–2023 juga mencatat bahwa ketersediaan internet dan komputer di sekolah-sekolah masih rendah, terutama di wilayah terpencil. Hambatan seperti kondisi geografis dan kurangnya infrastruktur menjadi penyebab utamanya. Secara keseluruhan, hanya sekitar 49,7% sekolah yang memiliki akses internet, dan 47,7% yang memiliki komputer. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan infrastruktur pendidikan masih menjadi tantangan besar. Pemerintah perlu memastikan bahwa semua siswa, di mana pun mereka

⁴² PRATHAM, *Annual Status of Education Report (Rural) 2022, 2022*.

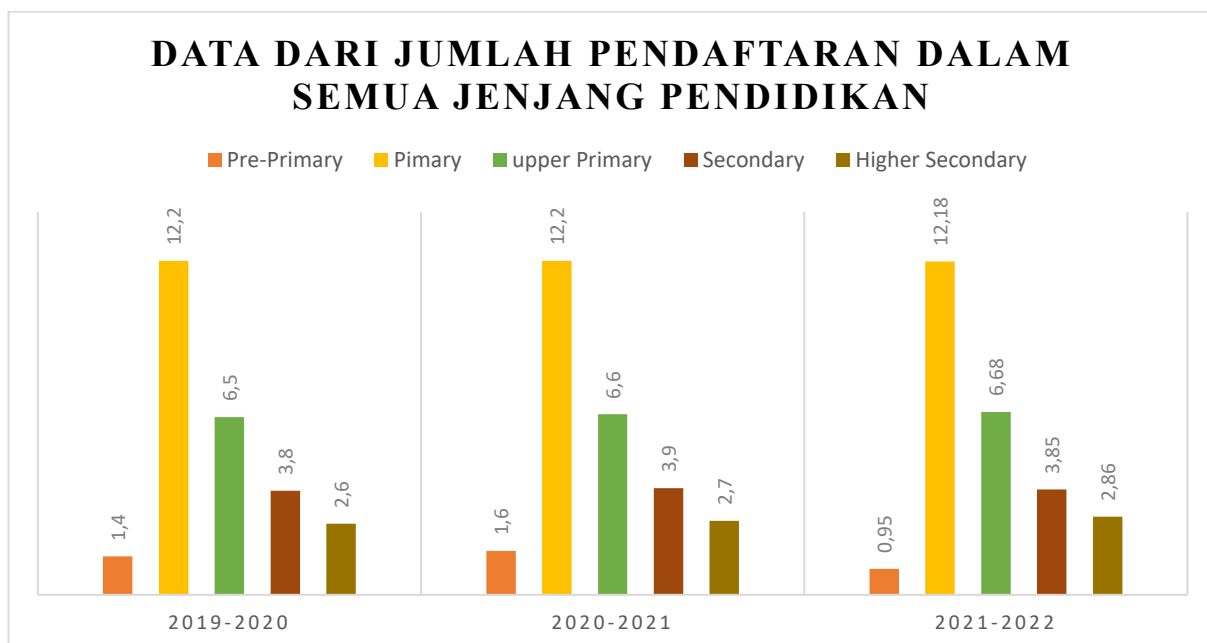
berada, bisa mendapatkan akses yang setara terhadap teknologi dan fasilitas pendidikan.

2.2.1 Kondisi Partisipasi Anak dalam Pendidikan Umum di India

India tengah mengalami perubahan yang sangat signifikan, baik dari segi ekonomi maupun dunia pendidikannya terkait dengan kebijakan baru yakni NEP 2020. Pertumbuhan masyarakat yang semakin pesat membuat India harus menyediakan fasilitas dari segi sarana dan prasarana pendidikan yang kiranya harus memadai. Pada realitanya, India telah berusaha melakukan perubahan dari segi kebijakan nasional pendidikan. Dari kebijakan ini, pemerintah ingin India kedepannya mengacu pada lima pilar utama dari NEP.

Dalam sub—bab ini, peneliti akan menjabarkan kondisi ataupun data dari persentase partisipasi anak laki-laki dan perempuan yang bersekolah dari segala jenjang pendidikan. Namun, dalam penjabaran grafik di bawah ini, peneliti berupaya menjabarkannya dari tahun 2019—2022 sehingga belum mencakup tahun 2022—2023, berdasarkan batasan tahun penelitian peneliti. Keadaan ini disebabkan karena data yang disediakan oleh pemerintah India belum tersedia sehingga peneliti mengalami keterbatasan data dalam proses pencariannya. Berikut merupakan diagram dari data pendaftaran sekolah secara keseluruhan.

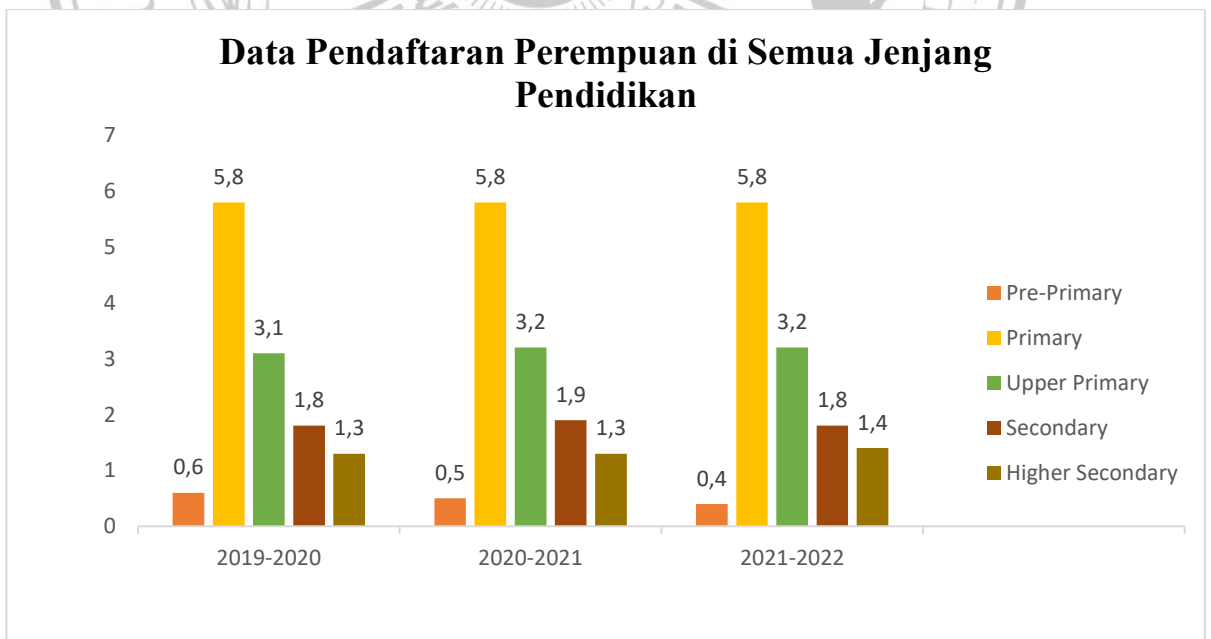
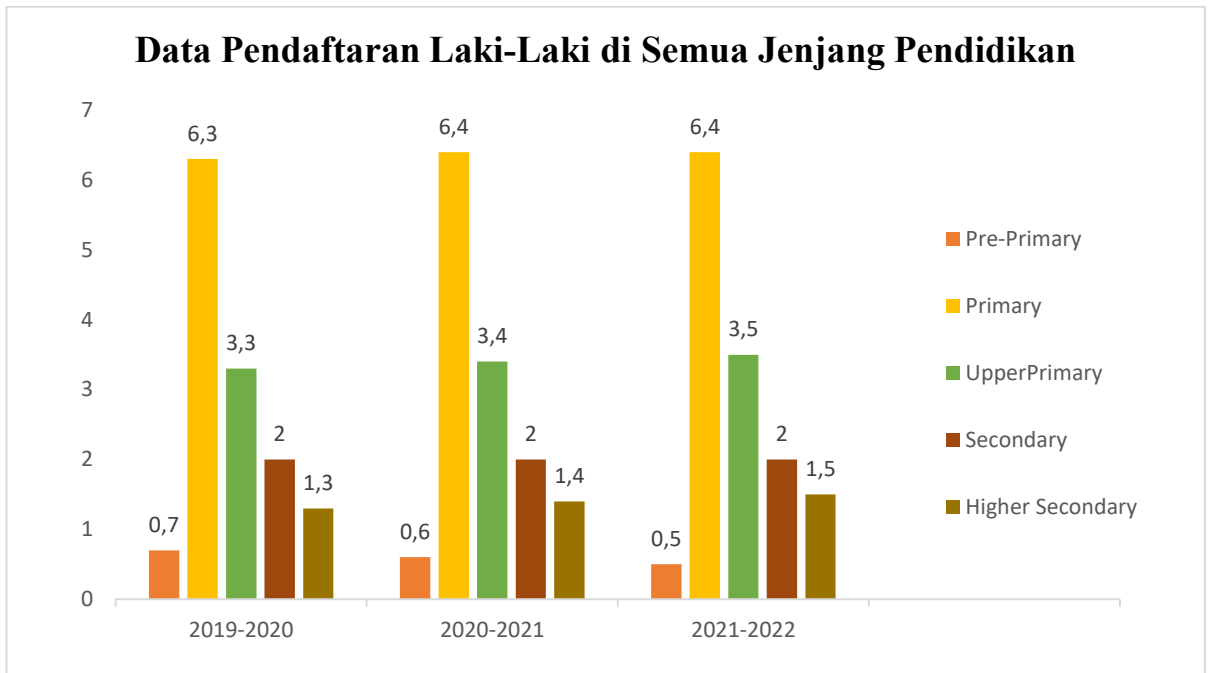
DATA DARI JUMLAH PENDAFTARAN DALAM SEMUA JENJANG PENDIDIKAN



Sumber data: UDISE+ 2021-2022

Berdasarkan data yang ada, jumlah siswa di semua jenjang pendidikan di India terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terutama pada jenjang primary, upper primary, secondary, dan higher secondary. Namun, hal ini tidak terjadi pada jenjang pre-primary (pendidikan anak usia dini), yang justru mengalami penurunan dari 1,6 juta pada tahun 2020–2021 menjadi 0,95 juta pada tahun 2021–2022. Kemungkinan besar, penurunan ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang masih terasa saat itu. Banyak orang tua mungkin memilih untuk menunda menyekolahkan anaknya karena khawatir dengan kondisi kesehatan dan terbatasnya akses pendidikan selama masa pembatasan aktivitas. Di sisi lain, peningkatan pada jenjang-jenjang pendidikan di atasnya menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan pemerintah India, terutama melalui NEP 2020, mulai membuahkan hasil. Kebijakan

ini berhasil membuka akses pendidikan yang lebih luas dan meningkatkan kualitasnya. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan di India mengalami perkembangan yang positif.



Data tersebut merupakan rekapan dari menteri pendidikan pemerintah India yang dilakukan dari tahun 2019—2022. Hanya saja, pendataan ini belum ada tersedianya rekapan tahunan 2022—2023. Hasil pendataan dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan laki-laki di jenjang primary sangat tinggi hal ini dikarenakan adanya dorongan wajib belajar serta adanya dorongan sosial lebih dari keluarga terhadap pendidikan anak laki-laki. Namun mengalami penurunan pada jenjang pendidikan higher secondary. Sebagian besar penurunan tersebut disebabkan karena tekanan ekonomi yang menjadikan anak laki-laki memilih mencari pekerjaan atau bekerja untuk pemenuhan kebutuhan keluarga (UNESCO 2021 Education in India: An overview of educational participation and equality). Namun kesempatan mendaftar bagi anak laki-laki dalam jenjang pendidikan selalu tinggi dibandingkan perempuan yang lebih rendah dalam semua jenjang pendidikan di India. Tentu hal ini tidak terlepas dari pengaruh norma sosial dan budaya yang masih melekat kental dalam kehidupan masyarakat India. Karena hal ini anak perempuan dan perempuan dewasa cenderung sering mendapatkan hambatan seperti pekerjaan domestik, keterbatasan akses, pernikahan dini dan fasilitas pendidikan (UNICEF 2022: Barriers girls education in India)

Walaupun angka dari data yang ditunjukkan tinggi, hal ini dapat menimbulkan pandangan bahwa perempuan banyak yang tidak melanjutkan pendidikan, bahkan tidak bersekolah. Faktor utama yang menjadi landasan sebagian besar anak perempuan tidak mampu melanjutkan pendidikan adalah

perekonomian.⁴³ Oleh sebab itu angka partisipasi perempuan dan anak perempuan cenderung lebih rendah dalam semua jenjang pendidikan di India. Hal ini tidak terlepas dari faktor masyarakat yang memiliki asumsi budaya dan norma sosial yang masih melekat baik dalam kehidupan mereka.

2.2.2 Kualitas Pendidikan Anak dan Perempuan di India

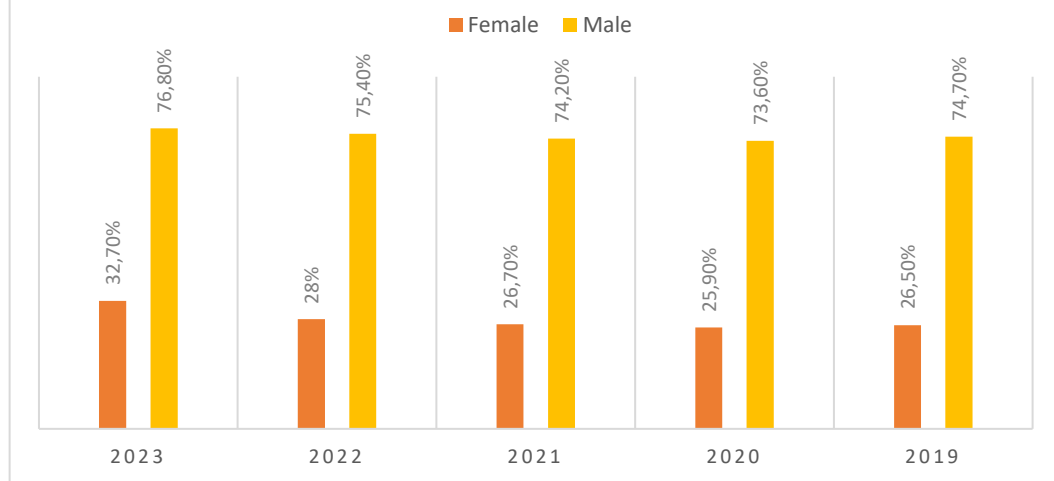
Kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas bagi perempuan mampu menciptakan keluarga yang baik dan sehat. Dengan begitu, perempuan yang berpendidikan berpeluang menciptakan keluarga yang kecil sehingga memberikan dampak terhadap penurunan laju pertumbuhan populasi yang terus meningkat.⁴⁴ Perlu diketahui bahwa kesetaraan gender dan akses sekolah merupakan pemenuhan terhadap pendidikan bagi perempuan. Kualitas pendidikan juga menjadi faktor terhadap pemenuhan tersebut. Namun, masih beragam faktor yang menjadikan pendidikan bagi perempuan dan anak belum berkualitas. Padahal, dengan memberikan kesempatan dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas, perempuan dapat berkontribusi sangat baik di dunia kerja. Hanya saja, pada kenyataannya, perempuan masih tertinggal jauh dari laki-laki dalam memperoleh kesempatan bekerja di India.⁴⁵

⁴³ Ministry of Education, “Unified District Information System For Education Plus (UDISE+) 2021-22,” *Government of India* (2023): 1–205, <https://dashboard.udiseplus.gov.in/#/home>.

⁴⁴ “Government Initiative Promoting Women’s Education In India,” last modified 2023, <https://bise.edu.in/womens-education-in-india/#>.

⁴⁵ ILO, *In India, the Labor Force Participation Rate among Females Is 32.7% and among Males Is 76.8% for 2023*, n.d., <https://ilostat.ilo.org/data/>.

DATA PERBANDINGAN PARTISIPASI PEKERJA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DI INDIA



Sumber dari: ILO

Data di atas adalah penjabaran dari pemerintah kementerian pekerjaan menunjukkan jika keikutsertaan perempuan dalam sebagai partisipan dalam dunia kerja sangat jauh dengan laki-laki. Hal ini menunjukkan akan ketimpangan gender bukan hanya dalam dunia pendidikan melainkan hingga kesempatan kerja bagi perempuan juga sangat kecil. Pengaruh pemerintah dan INGO yakni UNICEF dalam dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam dunia kerja kedepannya.

Kondisi tersebut tentu tidak terlepas dari upaya yang dilakukan pemerintah, yakni pemenuhan kebutuhan peningkatan infrastruktur, yang mengalami kesenjangan. Daerah perkotaan dan pedesaan mengalami kesenjangan infrastruktur, seperti gedung yang layak, laboratorium, dan akses internet untuk daerah perkotaan. Sedangkan daerah pedesaan kekurangan fasilitas internet, toilet,

air minum, dan listrik. Hal ini berdasarkan laporan dari menteri pendidikan India data per tahun 2021-2022.⁴⁶

Selain membangun infrastruktur yang memadai, India juga masih menghadapi tantangan besar dalam hal pemerataan akses pendidikan, terutama bagi anak perempuan di daerah pedesaan dan keluarga dengan ekonomi rendah. Menurut data dari Annual Status of Education Report (ASER) tahun 2021, partisipasi anak perempuan usia 6–14 tahun dalam pendidikan memang cukup tinggi, yaitu mencapai 92,4%. Namun, angka ini turun drastis pada usia 15–16 tahun, di mana hanya 73,6% yang masih bersekolah. Penurunan ini terjadi karena berbagai faktor, seperti pernikahan dini, tanggung jawab pekerjaan rumah, budaya patriarki, dan kurangnya fasilitas pendidikan di sekitar tempat tinggal mereka. Data dari National Family Health Survey (NFHS-5) tahun 2019–2021 juga menunjukkan bahwa sekitar 23% perempuan di India menikah sebelum usia 18 tahun. Hal ini menjadi salah satu penyebab utama anak perempuan berhenti sekolah.⁴⁷

Pemerintah India sebenarnya telah membuat beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah ini, seperti program Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) dan pemberian insentif pendidikan bagi anak perempuan. Program-program ini bertujuan untuk mencegah pernikahan dini dan meningkatkan jumlah anak perempuan yang melanjutkan ke jenjang sekolah menengah. Sayangnya, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi banyak hambatan. Beberapa di

⁴⁶ Ministry of Education, “Unified District Information System For Education Plus (UDISE+) 2021-22.”

⁴⁷ Kanchan Joshi and Neeta Bora Sharma, “Importance of Girl Child Education in India,” *Journal of Acharaya Narendra Dev Research Institute* 29, no. August (2020): 98–101, https://andjournalin.files.wordpress.com/2021/08/vol29_16.pdf.

antaranya adalah kurangnya transportasi yang aman, ketimpangan peran gender dalam keluarga, dan masih rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan untuk anak perempuan.⁴⁸ Oleh karena itu, agar partisipasi anak perempuan dalam pendidikan bisa terus meningkat, diperlukan tidak hanya kebijakan dari pemerintah, tapi juga dukungan dari masyarakat dan perubahan pola pikir yang lebih mendukung kesetaraan.⁴⁹

Pada kenyataannya, pendidikan yang ditempuh oleh perempuan—dibuktikan pada diagram batang di 2.1.2 adalah hasil pemikiran masyarakat India pedesaan yang masih konservatif. Alasan lain juga menjadi kendala bagi mereka, seperti pemenuhan fasilitas dari negara, terutama mencakup transportasi.⁵⁰ Namun, tidak dipungkiri masih ada kalangan anak-anak di India yang belum mendapatkan hak sebagaimana mestinya di tingkat prasekolah. Oleh karena itu kualitas pendidikan di India masih adanya ketimpangan akses, rasio guru dengan jumlah siswa yang cukup tinggi, dan masih banyaknya fasilitas pendidikan yang belum tersedia dengan baik di beberapa negara bagian. Tentu hal ini mendorong terhadap rendahnya angka partisipasi dan tingkat literasi, khususnya pada perempuan. Selain itu, data per tahun 2022 untuk tingkat literasi perempuan masih terhitung rendah dibandingkan dengan literasi laki-laki di India. Data tersebut berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh UNESCO bahwa perempuan berada pada 69,1%, sedangkan

⁴⁸ Ibid. Hal-36

⁴⁹ Donald L. Barnes, "Recent Trends in Education," *Teacher Educator* 11, no. 4 (2023): 10–22.

⁵⁰ Anuradha Parasar, "Women Education in India: An Empirical Study," *AN EMPIRICAL STUDY Mr. Suresh Kashinath Ghatge (Corresponding Author) Ph.D. Research Scholar, Liberal Arts*, no. December (2022), www.neuroquantology.com.

laki-laki lebih tinggi sebanyak 83,5%.⁵¹ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan di India berpacu dan bergantung pada suksesnya kebijakan pendidikan yang baru dan implementasi kebijakan yang merata di seluruh wilayah India.

Oleh sebab itu, pemerintah India akan terus melakukan upaya terhadap tingkat literasi melalui peningkatan kualitas pendidikan bagi anak dan perempuan di India. Implementasi usaha pemerintah tertuang dalam bentuk kebijakan baru tentang pendidikan yang disebut NEP. Pada Kebijakan pendidikan India sebelumnya yaitu National Policy on Education (NPE) 1986 yang sudah diperbaharui pada 1992, lebih cenderung memiliki kurikulum yang kaku dan belum bisa mengakomodasi kebutuhan terhadap pendidikan modern. Selain itu tantangan lainnya adalah tidak meratanya fasilitas pendidikan serta penanganan yang kurang efektif sebelumnya dalam meratakan program pendidikan ke seluruh wilayah di India sehingga adanya kesenjangan pendidikan antara pedesaan dan perkotaan dalam kebijakan sebelumnya (dalam program pdf NPE 1986). Tentu hal ini akan menghambat proses peningkatan pendidikan, oleh karena itu NEP dibentuk sebagai bentuk pembaharuan terbaru untuk menyesuaikan sistem dan kurikulum pembelajaran dan program yang menyesuaikan dengan keterampilan abad-21. Selain itu NEP menjadi program pendidikan baru India yang lebih inklusif dengan persiapan yang matang dalam menghadapi berbagai tantangan dan persiapan terhadap generasi muda.

⁵¹ UNESCO, "Adult Literacy in India Is Lower among Women than among Men," *Unesco.Org*, <https://uis.unesco.org/bdds>.

Kebijakan pendidikan ini menekankan pengembangan prinsip yang tidak hanya berfokus pada keterampilan dasar, keterampilan literasi, dan numerasi saja, tetapi juga peningkatan dalam keterampilan sosial-emosional yang mencakup kesadaran dalam berbudaya, kerja tim, kepemimpinan, komunikasi, serta empati.⁵² Terbentuknya kebijakan ini bertujuan untuk menguniversalkan pendidikan prasekolah dengan memberikan penekanan khusus pada aspek pencapaian literasi/numerasi dasar.

2.2.3 Hambatan Terhadap Akses Pendidikan Anak Dan Perempuan di India

Sektor pendidikan India memang mengalami kemajuan, namun tidak menutup kemungkinan terhadap akses pendidikan yang setara masih belum terpenuhi secara merata dan masih menjadi tantangan besar bagi anak-anak dan perempuan. Sebagian besar anak perempuan dan perempuan yang putus sekolah tidak hanya disebabkan karena ketimpangan faktor ekonomi, melainkan karena faktor norma budaya yang kuat, kondisi geografis, dan faktor pemenuhan infrastruktur pendidikan yang belum merata. Oleh karena itu untuk memahami lebih jauh terkait dengan hambatan terhadap pendidikan anak-anak dan perempuan di India berikut akan diuraikan tentang hambatan dalam pendidikan di India.

a. Kondisi Ekonomi

Perekonomian masyarakat India adalah problem yang sangat intens dalam kehidupan mereka, baik dalam memperoleh kehidupan yang layak maupun

⁵² Ministry of education, "National Education Policy, 2020," *Education.Gov.In*, last modified 2023, <https://www.education.gov.in/nep/about-nep>.

pendidikan yang berkualitas sekali pun. Pemerintah India sendiri telah melakukan segala bentuk upaya dalam memberikan pendidikan yang berkualitas bagi semua masyarakat. Perlu diketahui bahwa kemajuan ekonomi tidak akan terlepas dari perkembangan teknologi yang terdorong dari ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, tantangan terbesar dari pemerintah India sendiri adalah memberdayakan masyarakat dengan pendidikan.⁵³

Kendala dalam akses pendidikan yang berkualitas bagi kalangan anak dan perempuan adalah masalah umum dalam lingkup sosio-ekonomi. Namun, kendala lain dari sosio-ekonomi adalah hambatan terhadap pelayanan infrastruktur sekolah yang memiliki kesenjangan antara India perkotaan dengan Pedesaan. Untuk fasilitas yang sebagian belum memadai, seperti ruang kelas, toilet, kondisi belajar dan mengajar (Untuk wilayah pedesaan atau negara bagian India) ketersediaan fasilitas Internet dan komputer untuk mengakses pembelajaran digital belum terpenuhi secara merata berdasarkan data UDISE+ 2021-2022 serta harapan rendah terhadap siswa yang kurang mampu (berasal dari keluarga miskin).⁵⁴

b. Kurangnya Fasilitas sekolah

Ketersediaan sekolah di sebagian negara bagian India seperti Ladakh tersedia sekitar 979 sekolah, Lakshadweep 37 bangunan sekolah, Delhi 5488

⁵³ The Hindu Bureau, "50% of India's Children Don't Have Access to Quality Education after Primary School: Development Economist Amir Ullah Khan," *Thehindu.Com*, 2023, <https://www.thehindu.com/education/50-of-indias-children-dont-have-access-to-quality-education-after-primary-school-development-economist-amir-ullah-khan/article67641574.ece>.

⁵⁴ Rashmi Rangarajan, Umesh Sharma, and Christine Grové, "Inclusion and Equity in India's New National Education Policy (NEP): An Analysis Using the Context Led Model of Education Quality," *International Journal of Inclusive Education* (2023): 1–21, <https://doi.org/10.1080/13603116.2023.2295907>.

Bangunan sekolah, Goa 1504 bangunan sekolah, dan andaman dan Nicobar Island tersedia 414 bangunan sekolah hal ini menjadi kendala yang tengah dihadapi oleh sebagian besar anak-anak di negara bagian India. Keadaan ini merupakan faktor banyaknya anak-anak di India yang belum mendapatkan fasilitas sekolah secara baik. Pendidikan prasekolah di India merupakan gabungan sekolah swasta dan pusat yang dikelola di bawah naungan pemerintah atau disebut sebagai Anganwadi.⁵⁵ Prasekolah merupakan langkah awal untuk anak-anak yang berusia di bawah 6 tahun. Pemberian pendidikan prasekolah sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesiapan mereka untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar. Secara umum, masih banyak faktor yang menjadi kendala dalam mendapatkan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dan perempuan. Masalah sosio-ekonomi merupakan wujud masalah dasar dari sebagian besar masyarakat India.

c. Faktor Kualitas Pengajar dan Tenaga Pengajar

Dalam upaya mencapai akses pendidikan yang berkualitas, tentu banyak aspek yang menjadi sorotan untuk mengembangkannya, seperti kualitas guru atau pendidik yang terlatih. Namun, saat ini, India kekurangan guru yang terlatih. Keadaan ini menjadi masalah yang serius dalam mencapai pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dan perempuan.⁵⁶ Adapun permasalahan lain selain sosio-ekonomi, kesenjangan regional juga menjadi inti permasalahan yang harus

⁵⁵ Pradeep Kumar Choudhury, Radhika Joshi, and Amit Kumar, "Regional and Socioeconomic Inequalities in Access to Pre-Primary Education in India: Evidence from a Recent Household Survey," *International Journal of Child Care and Education Policy* 17, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.1186/s40723-023-00117-4>.

⁵⁶ Soyhunlo Sebu, "Access to Quality Education, a Basic Right of Every Child," *Journal of Education, Society and Behavioural Science* 36, no. 7 (2023): 41–46.

dihadapi oleh pemerintah India dalam menangani hambatan terhadap akses pendidikan anak-anak dan perempuan.⁵⁷

d. Pernikahan Dini

Persentase keikutsertaan perempuan dalam pendidikan memiliki kendala tertentu yang sangat general akan permasalahannya. Pernikahan dini adalah kendala umum terjadi dan masih dipraktikkan walaupun dengan angka persentase yang rendah di India, karena hal ini angka putus sekolah bagi perempuan sangat tinggi dibandingkan laki-laki dengan jumlah. Namun sebagian besar perempuan yang melakukan pernikahan dini adalah mereka yang belum genap berusia 18 tahun (Batas legal pernikahan di India) tentu hal ini akan mempengaruhi terhadap proses pendidikan mereka. Berdasarkan data dari National Family Health Survey (NFHS-5) tahun 2019-2021⁵⁸ menyatakan jika perempuan yang menikah dibawah usia legal mereka sekitar 23.3% setara dengan 318,28 juta jiwa perempuan dimana data ini tentu menunjukkan jumlah yang tidak sedikit dengan perbandingan populasi masyarakat India per tahun 2019 berjumlah 1,366 Miliar jiwa berdasarkan data dari World Bank.⁵⁹

e. Faktor Sosial dan Budaya

Tentu faktor sosial-budaya yang keterkaitannya kuat, permasalahan ekonomi keluarga perempuan atau kemiskinan juga menjadi permasalahan pokok

⁵⁷ *Ibid Hal-38*

⁵⁸ International Institute for Population Sciences (IIPS) and ICF, "National Family Health Survey(NFHS-5) India 2019-21," *Demographic and health surveys Volume I* (2021): 1-714, <https://dhsprogram.com/methodology/survey/survey-display-541.cfm>.

⁵⁹ world bank group, "India Population," last modified 2019, <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2019&locations=IN>.

berdasarkan laporan ASER 2019 bahwa sekitar 15,4%⁶⁰ perempuan yang berusia 15-16 tahun tidak bersekolah karena faktor kemiskinan yang dipengaruhi oleh biaya pendidikan, beban ekonomi yang berat, kesetaraan gender dan permasalahan lainnya yang masih melekat dengan kehidupan masyarakat serta permasalahan sosio-budaya yang ketat di India yang sering dibebankan kepada anak perempuan.⁶¹ Dengan demikian, upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah India untuk mengatasi permasalahan ini sangat besar karena semua terkait dengan pemenuhan hak-hak bagi anak-anak dan perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

Masalah lain yang dihadapi adalah kesenjangan gender dan prioritas kasta. Kasta dan gender di India masih menjadi diskriminasi paling luas dalam masyarakat India karena mempengaruhi keterampilan dasar anak-anak dalam kelompok tertentu. Hal ini akan mempengaruhi terhadap rendahnya tingkat pembelajaran di India, dengan bukti bahwa bank Dunia mengurutkan India dalam daftar tujuh negara yang mayoritas siswa kelas 2 tidak dapat melakukan pengurangan dua digit.⁶²

⁶⁰ ASER, *Annual Status of Education Report (Rural)*, ASER Center, 2019, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

⁶¹ Chittibabu Putcha et al., "Challenges Of Women In Accessing Higher Education In India," *Journal of Namibian Studies* 33, no. September (2023): 2251–2265.

⁶² Archana Aggarwal Deepak Kumar, Bhanu Pratap, "Children's Early Foundational Skills and Education Continuation in India: Heterogeneous Analysis by Caste, Gender and Location," *Science direct* 30 (2023), <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2452292923000188>.

Pada kenyataannya, permasalahan yang dialami oleh anak-anak dan perempuan di India memiliki kesamaan dan perbedaan. Adapun kesamaannya adalah permasalahan dari segi sosio-ekonomi keluarga yang belum memadai dan fasilitas dari pemerintah. Di sisi lain, letak perbedaannya adalah perempuan di India memiliki kendala terhadap akses untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, yakni permasalahan kesetaraan gender berdasarkan data studi dari Lancet Regional health memberikan pernyataan bahwa India tertinggal dalam SDG-5 terkait dengan kesetaraan gender. Pasca Pandemi Covid-19 perempuan di India mengalami rendahnya partisipasi kerja, peningkatan atas kekerasan, pernikahan dini (40% dari 60 juta pernikahan dini di dunia).⁶³

2.3 Upaya Pemerintah India Menangani Masalah Pendidikan Anak-Anak dan Perempuan

Pembentukan NEP 2020 merupakan penyempurnaan dari sistem kebijakan pendidikan sebelumnya. Dengan segala upaya untuk memberikan perubahan terhadap kemajuan pendidikan di India, sistem yang lebih inklusif adalah mengutamakan pendidikan dasar bagi semua anak di India dari segala kelas sosial serta memberikan kesetaraan pendidikan bagi perempuan.⁶⁴ Kebijakan ini sudah jelas dipaparkan dalam modul kerja NEP 2020 yang menyinggung pendidikan merata bagi semua anak-anak di India, pemberian kemudahan akses pendidikan

⁶³ Siddhivi Singh, "Stall-Ing Violence: A Fight for Gender Justice at NFC Market," *Times of India*, 2023, <https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/stall-ing-violence-fight-gender-justice-nfc-market/articleshow/105505791.cms>.

⁶⁴ Prabha Singh Parihar, Dr. Seema Ghanghas, Dr. Waseem Ahmad Khan, "National Education Policy 2020 and Gender Inclusiveness," *Journal of Informatics Education and Research* 4, no. 1 (2024): 117–122.

bagi perempuan, serta pemberdayaan yang baik tanpa ada kendala dari segi mana pun. Selain itu, kebijakan NEP 2020 juga merupakan hasil dari penjabaran program UNICEF sebagai bentuk kerja sama dengan pemerintah India dalam memberikan kesempatan atau akses untuk mendapatkan pendidikan yang setara bagi perempuan. Dengan demikian, perempuan dapat merasakan pendidikan tanpa adanya kekerasan dan diskriminasi kesetaraan gender.

Program dari NEP dibentuk sebagai usaha memodernisasi sistem pendidikan India setelah 34 tahun. Dalam kebijakan ini, NEP 2020 memprakarsai upaya India sebagai negara yang mendominasi kebijakan pendidikan dunia. Oleh karena itu, NEP menjadi gebrakan baru dalam kebijakan pendidikan yang mampu memberikan perubahan signifikan. Selain membahas terkait dengan perubahan sistem pendidikan India, NEP juga memperhatikan permasalahan akses pendidikan kepada semua anak tanpa batas dari berbagai kelas sosial serta kesetaraan dalam pendidikan. Di samping itu, NEP mendorong masyarakat untuk mendapatkan pendidikan berkualitas yang inklusif. Pada akhirnya, upaya-upaya tersebut menjadi tujuan utama dari NEP.⁶⁵

Cakupan dalam kebijakan NEP sangatlah kompleks. Berbagai kebijakan bukan hanya membahas terkait dengan sistem pendidikan dan pengaruhnya kepada anak-anak dan perempuan saja, melainkan juga kinerja dari para guru sebagai pengajar. Semakin berkualitasnya kualitas pengajar atau guru, pendidikan akan

⁶⁵ Subhajit Jana and Tarini Halder, "Approaches and Concerns of National Education Policy 2020 towards Inclusive Education," *International Journal of Research and Review* 10, no. 1 (2023): 248–255.

tumbuh lebih baik. Pengaruh positif dari kebijakan ini sangat berpengaruh, terutama terhadap kebijakan yang melibatkan pemberdayaan perempuan, yang berdampak terhadap keikutsertaan perempuan dalam segala bidang. Perempuan yang terlibat dalam pemberdayaan akan mampu kontribusi pada pendidikan bagi anak sebagai generasi penerus bangsa, mampu mengatasi permasalahan sosial budaya yang terus menjadikan mereka aktor utama di dalamnya, meningkatkan peran mereka dalam bermasyarakat, sampai mendapatkan pendidikan yang tinggi.⁶⁶

NEP 2020 merupakan kebijakan negara India terkait dengan pendidikan pertama selama abad ke 21. Tujuannya adalah untuk mengatasi berbagai tuntutan yang semakin berkembang di India. Kebijakan ini telah melakukan usulan revisi dan pembenahan terkait semua aspek struktur pendidikan, termasuk regulasi dan tata kelolanya. Hal ini tentunya bertujuan untuk mampu menciptakan sistem baru yang selaras dengan tujuan aspirasional pendidikan abad ke—21. Kebijakan ini memberikan tekanan khusus pada perkembangan potensi kreatif. Kebijakan ini mendasari prinsip bahwa pendidikan harus mengembangkan tidak hanya kapasitas kognitif yang mencakup dalam kapasitas dasar seperti numerasi dan literasi, melainkan meningkatkan kapasitas dalam watak sosial, etika, dan emosional.⁶⁷

Kebijakan NEP 2020 tidak terlepas dari segala bentuk kekurangan dan kendala dalam pengimplmentasian kebijakan dilapang. Hal ini mendukung terhadap hadirnya UNICEF sebagai organisasi Internasional dalam membantu

⁶⁶ Manisha Nahar, “For Promoting Women Empowerment : A Study of Role of National Education Policy of India 2020,” *International Journal of Research and Analytical Reviews* 9, no. 3 (2022): 773–784.

⁶⁷ Ministry of education, “National Education Policy, 2020.”

kendala dan memperbaiki kekurangan dari penerapan kebijakan tersebut. Tantang yang harus dihadapi dari penerapan kebijakan NEP 2020 ini meliputi kesiapan guru dalam mengimplementasikan ketentuan serta syarat yang berlaku dalam kebijakan NEP 2020, kesenjangan nyata terhadap pemerataan fasilitas internet dan perkembangan digital yang masih belum merata anatar pedesaan dan perkotaan, pelatihan terhadap guru pengajar masih kurang efektif, serta pembangunan sekolah yang memadai memicu angka putus sekolah yang tinggi.⁶⁸ Tantangan ini memberikan peluang bagi UNICEF untuk memberikan bantuan dan penerahan kinerja sebagai OI dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak dan perempuan di India yang terpinggirkan atau bahkan kalangan mereka yang belum mendapatkan fasilitas sama sekali. Sebagai bukti jika program yang dihadirkan oleh UNICEF mendukung terhadap kebijakan NEP 2020 yaitu dalam penyediaan sekolah dan pemenuhan fasilitas bagi mereka yang berkebutuhan khusus.⁶⁹

Pemerintah India selalu mengupayakan kebijakan, strategi, dan usaha untuk menangani semua permasalahan pendidikan anak-anak dan perempuan di negaranya. Upaya tersebut tentu membutuhkan kerjasama yang baik dengan negara bagian lainnya. Adapun program yang telah dibentuk oleh pemerintah India untuk menangani masalah pendidikan anak-anak dan perempuan adalah NEP. Selain itu, program NEP juga menjadi solusi untuk menangani kalangan anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu sehingga pemenuhan pendidikan bagi

⁶⁸ Neha Mahesh Inamdar, "Navigating the National Education Policy 2020: Challenges and Opportunities in Its Implementation," *Research Gate*, no. February (2025).

⁶⁹ et al. Grimes, P., "Disability-Inclusive Education Practices in India: UNICEF Regional Office for South Asia, Kathmandu" (2021).

perempuan yang terkendala akses pendidikan seperti kesetaran gender, kemiskinan, dan sosial budaya dapat teratasi secara tepat.

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah India dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah digitalisasi pendidikan. Program PM eVIDYA diluncurkan pada tahun 2020 yang bertujuan untuk memberikan penyediaan pendidikan kepada siswa melalui platform digital seperti DIKSHA dan Swayam. Penyediaan program PM e-VIDYA adalah bentuk respon dalam membantu terhadap kerugian pembelajaran selama Covid-19 pada tahun 2019.⁷⁰ Swayam merupakan program yang diprakarsai oleh pemerintah India yang dirancang untuk mencapai tiga prinsip utama kebijakan pendidikan yaitu akses, pemerataan, dan kualitas. Terbentuknya Swayam sebagai bentuk upaya dalam menjembatani kesenjangan digital bagi pelajar yang hingga kini belum tersentuh oleh revolusi digital dan belum mampu tergabung dalam arus utama ekonomi pengetahuan.⁷¹

Fasilitas yang disediakan adalah video kusus seperti video ceramah, materi bacaan yang disiapkan untuk di unduh/dicetak, tes penilaian diri, dan form diskusi daring untuk menghilangkan keraguan diri. Diksha atau Digital Infrastructure for Knowledge Sharing merupakan bentuk upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah India dalam menunjang pemerataan pendidikan melalui sebuah platform. Dengan melalui penyediaan bahan ajar yang memanfaatkan perkembangan teknologi,

⁷⁰ PIB Delhi, "PM E-VIDYA DTH Channel for Indian Sign Language," last modified 2024, <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2081633#:~:text=fostering greater inclusion.-,PM e-Vidya: A Comprehensive Digital Education Initiative,%2C courses%2C and interactive content.>

⁷¹ Gov of India, "About Swayam," <https://swayam.gov.in/about>.

Diksha dapat diakses oleh semua kalangan selain murid seperti guru, orang tua, Humas dan Tata usaha atau pejabat dan lainnya.⁷²

Adapun program Beti Bachao Beti Padhao merupakan program pemerintah Program ini diluncurkan pada tahun 2015 namun masih terus beroperasi hingga tahun 2023 dan menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Memfokuskan terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta rendahnya partisipasi perempuan dalam pendidikan. Untuk mencapai tujuannya dalam pembangunan perempuan dan anak, dibawah naungan Departemen pemberdayaan perempuan dan anak bekerjasama dengan UNICEF dan organisasi non-pemerintah lainnya untuk mencapai tujuannya.⁷³

penjabaran diatas merupakan upaya-upaya dilakukan dan diusahakan oleh pemerintah India dalam menyongsong pendidikan yang berkualitas dan bahkan kefokusan pemerintah terhadap kesetaraan gender juga menjadi penyelesaian masalah penting juga. Oleh karena itu, tentu dari kebijakan upaya yang telah dibuat akan memberikan dorongan besar terhadap pendidikan dan keselarasan tanpa adanya perbedaan gender dalam dunia pendidikan.

2.4 Profil UNICEF (United Nations Children's Fund)

United Nations Children's Fund (UNICEF) merupakan badan organisasi PBB yang fokus penangannya terhadap anak-anak yang mengalami , upaya yang dilakukan oleh UNICEF yakni memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap

⁷² Gov of India MoE, "DIKSHA," <https://diksha.gov.in/>.

⁷³ "Women and Child Development Department," <https://wcdhry.gov.in/>.

anak terutama mereka yang paling tidak beruntung dan yang mengalami kesulitan dalam penjangkauan. Lebih dari 190 negara dan wilayah, UNICEF memberikan segala bentuk bantuan yang diperlukan untuk anak-anak bertahan hidup, berkembang, dan memenuhi potensi mereka. UNICEF sendiri dibentuk pada tahun 1946 sebagai solusi yang dilakukan saat dunia melakukan perang Dunia II untuk membantu anak-anak, ibu, dan kalangan muda yang masa depannya terancam.

UNICEF berkantor pusat di New York, Amerika Serikat dan memiliki kantor regional juga telah melakukan kerjasama dengan 190 negara dan wilayah di seluruh dunia. Dalam penyelesaian misi UNICEF bekerja sama dengan pemerintah negara, organisasi non-pemerintah (NGO), dan sektor swasta untuk mencapai tujuannya. Untuk pendanaannya UNICEF mendapatkan bantuan secara sukarela dari pihak swasta dan kerjasama dengan pemerintah, organisasi internasional, perusahaan, dan Individu. Selain itu juga pendanaan lainnya dikumpulkan melalui kampanye dan pembentukan acara besar penggalangan dana. Pemimpin organisasi ini adalah seorang Direktur Eksekutif, yakni Catherine M. Russel.

Sebagai organisasi internasional UNICEF memiliki Misi dan tujuannya. Misi UNICEF adalah berdasarkan mandat dari Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNICEF berupaya melindungi hak-hak setiap anak, baik di masa damai maupun dalam masa krisis. Karena hak kanak-kanak bersifat universal. Di samping itu, bentuk pelayanan lainnya adalah pemberian vitamin, vaksin, sampai bantuan kesehatan lainnya kepada kalangan anak-anak dan siapa pun yang membutuhkan karena terdampak perang antar negara atau pun bencana alam dan wabah penyakit.

Kehadiran UNICEF merupakan solusi bagi semua anak dan kaum muda yang masa depannya terancam. Adapun solusi yang diberikan berupa pelatihan dalam segi pelayanan kesehatan, pendidikan, penggunaan lahan berkebun, mengelola kolam ikan, beternak unggas yang baik. Selain itu, pemberian pelatihan terkait dengan pentingnya kebersihan air, sanitasi guna mengurangi penyakit dan tingkat kematian anak-anak, sampai melakukan kampanye untuk memberantas berbagai penyakit yang mematikan telah terlaksana dengan baik. Semua upaya atau program itu dilakukan oleh UNICEF dari tahun-ketahun untuk kesejahteraan anak-anak dan kaum muda di seluruh dunia⁷⁴. Faktor utama yang melatarbelakanginya tidak lain agar hak-hak mereka dapat diperjuangkan, penyesuaian mandat sebagai organisasi yang menjangkau setiap kebutuhan anak, sampai melindungi hak-hak anak untuk bertahan hidup.

Karena bagi UNICEF hak setiap anak dan kalangan muda adalah hal yang harus diperjuangkan. Kesetaraan hidup, mendapatkan pendidikan, sanitasi yang baik, tidak adanya perbandingan gender serta kesehatan adalah komponen penting bagi mereka untuk melanjutkan dan mendapatkan kehidupan yang berkualitas untuk masa depan.

2.4.1 UNICEF di India

Perluasan kinerja yang dilakukan oleh UNICEF di luar kawasan Eropa merupakan bentuk komitmennya sebagai organisasi yang memiliki pelayan dalam

⁷⁴ UNICEF, "What We Do," <https://www.unicef.org/what-we-do>.

bentuk bantuan kesejahteraan bagi anak-anak dan kalangan muda. Hal ini telah dilakukan oleh UNICEF dengan melakukan kerjasama dengan negara India sebagai bentuk perluasan relasinya. Pada tahun 1949, UNICEF menjalin kerjasama dengan India melalui pembangunan sistem yang berfokus pada sektor obat dan farmasi dengan persediaan bantuan serta peralatan teknis. Hubungan kerjasama yang terus terjalin menunjukkan kualitas UNICEF yang tidak diragukan untuk membantu India dalam agenda Revolusi Putih. Revolusi ini merupakan upaya pemenuhan nutrisi anak-anak dan kaum muda dalam wujud program pemberian susu. Beralaskan upaya tersebut, UNICEF membantu penyediaan koperasi susu yang diproduksi langsung dari peternak setempat. Karena hal tersebut, India menjadi negara produsen susu terbesar di dunia.⁷⁵

Bentuk bantuan lain yang tidak kalah penting adalah penyediaan layanan bagi pemerintah India dalam pengembangan anak terpadu. Bantuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak di bawah usia enam tahun serta ibu hamil dan menyusui. Adapun skema layanan ini telah berkontribusi hingga 40 juta jiwa anak di India kembali mendapatkan kesehatan yang layak. Dalam setiap programnya, UNICEF selalu mengupayakan yang terbaik dan berkomitmen penuh terhadap pemenuhan hak-hak serta pembangunan terhadap penjangkauan anak di penjuru India. Sasaran utama UNICEF di India adalah setiap anak yang terlahir harus mendapatkan awal kehidupan yang baik sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. UNICEF India juga terus membutuhkan dukungan dalam bentuk donasi yang datang dan

⁷⁵ unicef, "OUR HISTORY," *UNICEF.Com*, <https://www.unicef.org/india/our-history>.

diberikan dari berbagai bisnis atau individu. Tujuan utama dukungan tersebut tidak lain untuk memperluas program kesehatan, gizi, air dan sanitasi, pendidikan, dan perlindungan anak, baik perempuan maupun laki-laki di India.

Keadilan yang selalu diberikan oleh UNICEF untuk kesejahteraan anak-anak di India, antara lain pemenuhan pendidikan yang berkualitas untuk semua kalangan. Ketidakadilan dalam lapisan-lapisan masyarakat di India dari segi tatanan sosial sudah diketahui secara umum, bahkan guru maupun siswa tidak jarang membawa perkara ini hingga dalam kelas. Kesenjangan sosial di India meliputi bahasa, kasta, agama, jenis kelamin, lokasi, budaya, serta adat istiadat beserta dengan bias yang melekat padanya. Karena masalah itulah, UNICEF memberikan akses serta kesempatan dalam belajar bagi anak-anak di India melalui program Education for All yang dibentuk sebagai bantuan dalam membantu pemerintah India dalam memberikan kesempatan belajar dan bersekolah kepada semua generasi dibentuk pada tahun 2000 .⁷⁶

Keadilan yang seharusnya diperoleh anak-anak di India tanpa batas merupakan kewajiban bagi UNICEF untuk menghilangkan stigma orang tua. Kebanyakan orang tua di India tidak dapat dilepaskan dari masalah perbedaan gender, kelas ekonomi yang buruk, lokasi yang jauh sehingga sebagian besar anak-anak tidak dapat memperoleh identitas etnis mereka sebagai peserta didik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Oleh sebab itu, UNICEF dengan keterbukaannya bertanggung jawab atas penyediaan pendidikan yang adil bagi setiap anak. Karena

⁷⁶ UNICEF, *Education For All*.

hal ini setara dengan pemberlakuan Undang-Undang Hak atas Pendidikan, UNICEF bersama dengan pemerintah India dan masyarakat sipil pada tahun 2009 berupaya memberikan jaminan kepada anak-anak atas hak mereka untuk mendapatkan pendidikan gratis dan wajib.⁷⁷

Dengan memanfaatkan bentuk kerjasama ini, UNICEF di India terus berusaha mengalokasikan upayanya dalam membantu dan mengatasi permasalahan yang terjadi di India seperti kesetaraan gender, pemerataan pendidikan yang berkualitas, program sanitasi di sekolah-sekolah, serta penyediaan layanan kesehatan lainnya. Adapun beberapa kegiatan dan Program yang telah di kembangkan oleh UNICEF India dari tahun 2019-2023.

2.4.2 Program UNICEF di India

Dalam program-program yang dibuat oleh UNICEF, penulis hanya akan menjabarkan program yang berkaitan dengan fokus penelitian ini, yaitu kualitas pendidikan di India melalui bantuan UNICEF.

2.4.2.1 Education for All

Education for All (EFA) merupakan program yang diluncurkan pada tahun 2000 mengutamakan pendidikan bagi seluruh anak di India tanpa memandang Gender. Kesetaraan gender merupakan aspek yang terpenting dan perlu dipertimbangkan oleh UNICEF sebagai bentuk bagian dari program pelatihan guru

⁷⁷ UNICEF, "UNICEF with India 75," *Unicef.Org*, <https://www.unicef.org/india/unicef-india-75>.

dan masyarakat luar, terutama orang tua. Program ini dibentuk tidak lain untuk memberikan kesempatan yang baik bagi anak-anak agar mereka dapat bersekolah secara teratur dan diperlakukan dengan baik. UNICEF juga melakukan kampanye tentang pentingnya pendidikan kepada masyarakat luas dan memfokuskannya pada daerah-daerah tertentu.

Program ini tentu saja memberikan peluang besar bagi semua masyarakat India untuk memperoleh hak mereka dalam menuntut ilmu. Dengan kata lain, masyarakat India mendapatkan kesempatan menikmati pendidikan di negara mereka. Kesempatan lain yang dilakukan oleh UNICEF adalah meningkatkan Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas (KGBV)—merupakan sekolah menengah yang mengkhususkan bagi anak perempuan kurang mampu dengan tinggal di asrama yang telah disediakan. Selain itu, UNICEF telah melakukan hubungan kerjasama dengan Departemen Pendidikan Sekolah dan Literasi dalam Evaluasi Nasional KGBV dengan melakukan tinjauan lokakarya tingkat negara bagian.

Perkembangan upaya yang dilakukan UNICEF terus berkembang dan mencoba melibatkan kelompok-kelompok kecil anak perempuan dalam perkembangan usaha yang dilakukannya. Dengan adanya kelompok kecil tersebut, UNICEF berupaya membentuk rasa percaya diri di kalangan anak perempuan. Upaya ini juga ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran dalam diri tentang pentingnya bersekolah sehingga setiap anak dapat menuntut pendidikan yang tinggi. Karena dengan begitu, mereka mampu memahami tentang pentingnya pengelolaan kebersihan dan sanitasi yang baik. Pada akhirnya, setiap anak memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dalam sebuah tim nantinya. Upaya yang dilakukan

UNICEF dalam kelompok-kelompok tersebut merupakan salah satu bentuk gerakan atau pun gebrakan baru yang membantu pemerintah India untuk mengurangi adanya praktik pernikahan dini. Selain itu, program tersebut juga difokuskan untuk membuka pikiran masyarakat setempat agar mereka berhenti bekerja di usia dini dan memilih untuk melanjutkan bersekolah secara teratur.

2.4.2.2 Girl Education

Dalam program ini, tidak memiliki spesifikasi waktu tertentu karena termasuk dalam program UNICEF sejak beberapa dekade lalu dan memang lebih memperhatikan fokus pada pendidikan bagi perempuan. Namun program ini digunakan secara efektif pada masa covid-19 dan sesudah, memberikan arahan dan dorongan kepada anak-anak perempuan di pedesaan dan negara bagian India untuk melanjutkan pendidikan dan program ini telah mampu mengurangi angka putus sekolah di India. Perhatian ini dilatarbelakangi oleh alasan bahwa pemberian pendidikan bagi anak perempuan dan perempuan dewasa akan memperkuat perekonomian sehingga mudah dalam mengurangi kesenjangan. Pendidikan memberikan kontribusi yang sangat signifikan kepada masyarakat agar mereka lebih stabil dan tangguh. Selain itu, pendidikan yang berkualitas juga memberikan kesempatan kepada anak perempuan atau perempuan dewasa agar mereka mendapat kesempatan dalam mengembangkan potensi mereka tanpa terhalang gender. Dengan demikian, pemberian akses pendidikan kepada anak perempuan dan perempuan dewasa bukan hanya tentang akses ke sekolah, melainkan

keamanan yang mereka dapatkan, kesetaraan yang sama di sekolah, dan sebagainya.⁷⁸

Dalam konteks Girl Education, UNICEF ingin semua anak perempuan dan perempuan dewasa mendapatkan haknya tanpa ragu karena banyak alasan terkait kendala yang harus dihadapi oleh setiap perempuan dalam mengakses pendidikan. Kendala tersebut berwujud kemiskinan, pernikahan dini, dan kekerasan berbasis gender yang berbeda-beda di lingkungan masyarakat. Kesetaraan gender menjadi prioritas utama dalam pendidikan. Oleh karena itulah, penanganan yang baik terhadap permasalahan kesetaraan gender akan memberikan pengaruh serta kontribusi yang baik pula sebagai upaya pengurangan kekerasan berbasis gender di sekolah, bahkan sampai bentuk praktik-praktik yang merugikan, termasuk pernikahan dini dan mutilasi alat kelamin perempuan.⁷⁹

Keterkaitan dari program ini terhadap konteks negara India itu sendiri tentu berkaitan yang tidak hanya menitikberatkan pada pendidikan perempuan. Latar Belakang dari perhatian ini adalah bentuk keselarasan dari program yang dikembangkan oleh UNICEF sebagai upaya dan dorongan kepada pemerintah India dalam meningkatkan pendidikan bagi perempuan dan kalangan khusus yang membutuhkan. Oleh karena itu peningkatan kapasitas infrastruktur dan kebutuhan perempuan dalam pendidikan menjadi prioritas bagi pemerintah India dalam kebijakan NEP. Peluang kesetaraan bagi perempuan dalam aspek pendidikan tercantum dalam NEP sebagai kebijakan baru pendidikan India, tentu hal ini

⁷⁸ UNICEF, "Girls' Education," *Unicef.Org*, <https://www.unicef.org/education/girls-education>.

⁷⁹ Ibid

memberikan pandangan yang baik terhadap semua kalangan perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dalam pendidikan.⁸⁰

2.4.2.3 Upaya UNICEF dalam pengembangan Teknologi Informasi Melalui program Yuwaah

Upaya lain yang dikembangkan oleh UNICEF dalam menggunakan teknologi sebagai sarana informasi Yuwaah merupakan program dari UNICEF yang diluncurkan pada tahun 2019 yang berdedikasi dalam membangun keterampilan dan perubahan dengan melibatkan kaum Muda di India terutama perempuan dan generasi muda yang terpinggirkan untuk bergabung dalam program Yuwaah dari UNICEF. Program ini merupakan sarana lain untuk memberikan peluang bagi kaum muda untuk bisa mengembangkan diri mereka dan menciptakan peluang sosial-ekonomi. Tentu dengan fasilitas yang terpenuhi dan memadai, memastikan bahwa kaum muda tidak hanya mampu mengarahkan masa depan mereka sendiri, namun dapat menjadi agen perubahan bagi kalangan kaum muda serta komunitas yang berpengaruh besar di seluruh negeri.⁸¹

Yuwaah juga telah melakukan kampanye terhadap peningkatan digital, yang bertujuan pandangan pemangangan di India. Selain itu kampanye yang diselenggarakan diharapkan dapat menjembatani kesenjangan yang terjadi antara pendidikan dan pekerjaan bagi kaum muda yang terpinggirkan. Kampanye yang dilakukan selama sebulan tersebut akan melakukan promosi menggunakan media

⁸⁰ Dr. Deepak Kem, "National Education Policy and Inclusion," *EPH - International Journal of Educational Research* 4, no. 3 (2022): 7–13.

⁸¹ Ibid. Hal.63 .

komunikasi digital yakni video penjelasan animasi, lagu-lagu pemagangan, kisah-kisah yang berkaitan dengan minat manusia, serta inisiatif media sosial yang dinamis. Hal ini dilakukan tentu bertujuan untuk dapat terhubung dengan pengusaha dan para pemuda di wilayah yang memiliki persentase pemagangan yang rendah.⁸²

Upaya yang dilakukan oleh UNICEF melalui program Yuwaah ini memberikan jalan terhadap pengembangan keterampilan, kemajuan ekonomi, serta dampak sosial dengan memfokuskan terhadap kalangan pemuda yang terpinggirkan. Tentu dengan begitu perhatian terhadap pemuda dan perempuan di pedesaan atau terpinggirkan mendapatkan perhatian dan dukungan lebih. Melalui inisiatif yang dilakukan oleh UNICEF dan partner kerja samanya dengan pemerintah daerah di India adalah bentuk dukungan terhadap pemberdayaan pemuda dan perempuan di pedesaan serta meningkatkan perkembangan implementasi pendidikan digital.⁸³ Kerjasama yang dilakukan oleh UNICEF dengan pemerintah daerah India adalah bentuk penyongsong terhadap perempuan dalam meningkatkan kesempatan dalam meningkatkan perekonomian desa melalui digital. Selain program Yuwaah, UNICEF juga telah meluncurkan program yang bekerjasama dengan Microsoft yaitu passport to earning. Program dimulai sejak tahun 2022-2023 dan telah membantu 1 juta lebih anak muda di India dalam

⁸² TNN, "UNICEF YuWaah, UNFPA, and UNHCR Launch Technical Guidelines to Ensure Youth on the Margins Are Prioritise," *Education Times*, last modified 2024, <https://www.educationtimes.com/article/newsroom/99736929/unicef-yuwaah-unfpa-and-unhcr-launch-technical-guidelines-to-ensure-youth-on-the-margins-are-prioritise>.

⁸³ Sandip Mishra, "Empowering Rural Youth & Women: MoRD, UNICEF YuWaah Partnership for Inclusive Growth," *Time Of India*, 2025, <https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/empowering-rural-youth-women-mord-unicef-yuwaah-partnership-for-inclusive-growth/articleshow/119608858.cms>.

menggunakan dan memahami perkembangan teknologi dalam proses pembelajaran baik secara luring, daring dan hibrida.⁸⁴

Program yang telah dijabarkan di atas adalah bentuk keterkaitan permasalahan berdasarkan penelitian skripsi ini. Oleh karena itu, adanya bentuk korelasi antara program dari UNICEF dengan keadaan pendidikan di India menjadikan landasan untuk dapat diimplementasikan secara langsung. Selain itu sebagian besar program yang bentuk oleh UNICEF adalah perkembangan teknologi digital dalam pembelajaran. Tentu harapannya adalah masalah peningkatan kualitas pendidikan anak dan perempuan di India dapat teratasi dengan efektif kedepannya.

⁸⁴ Generation Unlimited, "Passport to Earning Certifies 1 Million Youth in India with Digital & Financial Skills in First Year," *Unicef.Org*, 2023, <https://www.unicef.org/genunlimited/stories/passport-earning-certifies-1-million-youth-india-digital-financial-skills-first-year>.